

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Aceh merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Aceh ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester II Tahun 2017. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Aceh. Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Plh Kepala,

Idra Andayana  
NIP 196705131994031001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	
A. PENDAHULUAN	
1. Dasar Hukum	1
2. Entitas Pelaporan	2
3. Periode Laporan	3
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	
1. Kebijakan Penggolongan/Kodefikasi	4
2. Kapitalisasi	4
3. Rekonsiliasi	5
4. Penyusutan BMN	5
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	6
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	7
1. Saldo Awal	7
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	7
3. Barang Milik Negara Pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017	19
E. INFORMASI BMN LAINNYA	21
1. Perkembangan Nilai BMN	21
2. Informasi Pengelolaan BMN	21
3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	22
4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	23
5. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah	
LAMPIRAN	
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD	
LAPORAN BARANG BERSEJARAH	
LAPORAN PENYUSUTAN	
LAPORAN BARANG HILANG	
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT	
LAPORAN BPYBDS	

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- s. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013

## **2. Entitas pelaporan**

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat

eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Aceh merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Aceh juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Periode Pelaporan**

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Aceh ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan semester II Tahun 2017.

## **B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

### **1. Kapitalisasi**

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Tahun 2017 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### **2. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Aceh Semester II Tahun Anggaran 2017, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut.

1. Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### **C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Aceh Periode Semester II Tahun 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Aceh. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester II Tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 57.317.550.609 ( Lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah ) dan terdapat mutasi tambah yang terjadi selama periode Semester II Tahun 2017. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada Perwakilan BPKP Aceh



## D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017

### 1. Saldo Awal

Nilai BMN per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 69.226.645.670. Jumlah ini terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp. 69.215.849.920 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 10.795.750

### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

#### a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 71.469.402** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 106.814.312** dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar **Rp. (35.344.910)** jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)
1	117111	Barang Komsumsi	Rp. 99.029.055	Rp. 66.445.250	Rp. (32.583.805)
2	117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp. 94.325	Rp. 94.325	Rp. 0
3	117114	Suku Cadang	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4	117131	Bahan Baku	Rp. -	Rp. -	Rp. -
5	117199	Persediaan Lainnya	Rp. 7.690.932	Rp. 4.929.827	Rp. (2.761.105)
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 106.814.312</b>	<b>Rp. 71.469.402</b>	<b>Rp. (35.344.910)</b>

Tidak terdapat barang persediaan dalam kondisi rusak berat dan usang.

**b. Tanah**

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 RP.37.003.522.000, Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 15,314 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 28.278.681.000, terdapat penambahan nilai karna koreksi Revaluasi pada saldo Tanah.

Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	15,314 m <sup>2</sup>	Rp. 37.003.522.000
Rusak Ringan	-. m <sup>2</sup>	Rp. -.
Rusak Berat	-. m <sup>2</sup>	Rp. -

**c. Peralatan & Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 4.992.103.114. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.992.103.114. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada peralatan dan mesin.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut.

**1) 3.01. Alat Besar**

Saldo Alat Besar pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp. 42.197.000. Tidak Terdapat mutasi tambah dan kurang pada Alat Besar.

Tidak terdapat Alat Besar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	8 Unit	Rp. 42.197.000
Rusak Ringan	- Unit	Rp. -
Rusak Berat	- Unit	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Peralatan Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

## 2) 3.02. Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp. 990.523.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp. 990.523.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Angkutan.

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan di atas, tidak terdapat Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	12 buah	Rp. 990.523.000
Rusak Ringan	- buah	Rp. -
Rusak Berat	- buah	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

## 3) 3.03. Alat Bengkel & Alat Ukur

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur.

## 4) 3.04. Alat pertanian

Saldo Alat Pertanian pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 25.520.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 25.520.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Pertanian.

Dari jumlah/nilai Alat Pertanian di atas, tidak terdapat Alat Pertanian yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan

Rincian data Alat Pertanian berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 Buah	Rp. 25.520.000.
Rusak Ringan	- Buah	Rp. -
Rusak Berat	- Buah	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**5) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga**

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1.516 buah dengan nilai sebesar Rp. 2.077.448.897. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.516 unit dengan nilai sebesar Rp . 2.077.448.897, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.

Dari jumlah/nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga di atas, tidak terdapat Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1.516 Buah	Rp. . 2.077.448.897
Rusak Ringan	- Buah	Rp. -
Rusak Berat	- Buah	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Alat Kantor & Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**6) 3.06. Alat Studio, Komunikasi & Pemancar**

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 81 buah dengan nilai sebesar Rp. 245.007.215. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 81 unit dengan nilai sebesar Rp. 245.007.215, tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.

Dari jumlah/nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, tidak terdapat Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat yang sedang dalam proses pemindahtanganan.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut ;

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	81 Buah	Rp. 245.007.215.
Rusak Ringan	- Buah	Rp. -
Rusak Berat	- Buah	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Atal Studio, Komunikasi & Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**7) 3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan**

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 8.625.580, Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp. 8.625.580, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Kedokteran dan Kesehatan .

Dari jumlah/nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	6 unit	Rp. 8.625.580.
Rusak Ringan	- unit	Rp, -
Rusak Berat	- unit	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Alat Kedokteran & Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**8) 3.08. Alat Laboratorium**

Saldo Alat Laboratorium pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp. 66.530.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp. 66,530.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Laboratorium.

Dari jumlah/nilai Alat Laboratorium di atas, tidak terdapat Alat Laboratorium yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	10 unit	Rp. 66.530.000.
Rusak Ringan	- unit	Rp -
Rusak Berat	-. Unit	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**9) 3.09. Alat Persenjataan**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Persenjataan.

**10) 3.10. Komputer**

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 159 unit dengan nilai sebesar Rp. 1.534.106.422. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 159 unit dengan nilai sebesar Rp 1.534.106.422, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Alat Komputer.

Dari jumlah/nilai Komputer di atas, tidak terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	159 unit	Rp. 1.534.106.422.
Rusak Ringan	- unit	Rp. -
Rusak Berat	- unit	Rp . -

Tidak terdapat Kelompok Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**11) 3.11. Alat Eksplorasi**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Eksplorasi.

**12) 3.12. Alat Pengeboran**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Pengeboran.

**13) 3.13. Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.

**14) 3.14. Alat Bantu Eksplorasi**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Bantu Eksplorasi.

**15) 3.15. Alat Keselamatan Kerja**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Keselamatan Kerja

**16) 3.16. Alat Peraga**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Alat Peraga.

**17) 3.17. Peralatan Proses/Produksi**

Saldo Alat Peralatan Proses/Produksi pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.145.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 2.145.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Peralatan Proses/Produksi.

Dari jumlah/nilai Peralatan Proses/Produksi di atas, tidak terdapat Peralatan Proses/Produksi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Proses/Produksi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	- unit	Rp. -
Rusak Ringan	- unit	Rp. -
Rusak Berat	1 unit	Rp 2.145.000.

Tidak terdapat Kelompok Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**18) 3.18. Rambu-rambu**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Rambu-rambu.

**19) 3.19. Peralatan Olahraga**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Peralatan Olahraga.

## 20) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 4.378.808.421

### d. Gedung & Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.840.771.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 35.490.928.061. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 2.603.159.219 dan mutasi kurang sebesar Rp. 23.253.316.280. Adanya Mutasi tambah dan kurang disebabkan karna Revaluasi BMN Tahun 2017 dan pengembangan melalui KDP.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut.

#### 1) 4.01. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 44 unit dengan nilai sebesar Rp. 14.700.386.000 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 41 unit dengan nilai sebesar Rp. 35.490.928.061, terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 2.462.774.219 dan mutasi kurang sebesar Rp. 23.253.316.280 pada Gedung dan Bangunan.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	44 unit	Rp. 14.700.386.000
Rusak Ringan	- unit	Rp. -
Rusak Berat	-. Unit	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### 2) 4.02. Monumen

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Monumen.

#### 3) 4.03. Bangunan Menara

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Bangunan Menara.



**4) 4.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 140.385.000. Nilai tersebut merupakan barang berlebih dari kegiatan revaluasi BMN.

**5) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 244.860.628.

**e. Jalan, Jembatan dan Irigasi**

Saldo Jalan, Jembatan dan Irigasi pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 23.718.000. Jumlah tersebut merupakan barang berlebih dari hasil revaluasi BMN.

Rincian mutasi Jalan, Jembatan dan Irigasi per bidang barang adalah sebagai berikut.

**1) 5.01. Jalan & Jembatan**

Saldo Jalan dan Jembatan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 23.718.000. Jumlah tersebut merupakan barang berlebih dari hasil revaluasi BMN.

**2) 5.02. Bangunan Air**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Bangunan Air.

**3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi**

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.953.000.

**f. Instalasi dan Jaringan**

Saldo Instalasi dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 432.497.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 432.497.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Instalasi dan Jaringan.

Rincian mutasi Instalasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut.

**1) 5.03. Instalasi**

Saldo Instalasi pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 7.497.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 7.497.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Instalasi

Dari jumlah/nilai Instalasi di atas, tidak terdapat Instalasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Instalasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1 unit	Rp. 7.497.000.
Rusak Ringan	- m <sup>2</sup>	Rp. -
Rusak Berat	- m <sup>2</sup>	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**2) 5.04. Jaringan**

Saldo Jaringan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 425.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 425.000.000, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Jaringan.

Dari jumlah/nilai Jaringan di atas, tidak terdapat Jaringan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jaringan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	1 m <sup>2</sup>	Rp. 425.000.000.
Rusak Ringan	-. m <sup>2</sup>	Rp. -
Rusak Berat	-. m <sup>2</sup>	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**3) Akumulasi Penyusutan Instalasi dan Jaringan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Instalasi dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 70.826.497.

**g. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 21.640.745. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 21,640.745, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

**1) 6.01. Bahan Perpustakaan**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 939 Buah dengan nilai sebesar Rp. 21.640.745. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 939 unit dengan nilai sebesar Rp. 21.640.745, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Bahan Perpustakaan.

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bahan Perpustakaan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

<b>Uraian Kondisi</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Nilai</b>
Baik	939 Buah	Rp. 21.640.745.
Rusak Ringan	- Buah	Rp. -
Rusak Berat	- Buah	Rp. -

Tidak terdapat Kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**2) 6.02. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

**3) 6.03. Hewan**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Hewan.

**4) 6.04. Ikan**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Ikan.

**5) 6.05. Tanaman**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Tanaman.

**6) 6.06. Barang Koleksi Non Budaya**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Barang Koleksi non Budaya.

**7) 6.07. Aset Tetap Dalam Renovasi**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo Aset Tetap Dalam Renovasi.

**h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki saldo aset KDP.

**i. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**

Tidak terdapat Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Perwakilan BPKP Aceh. Karna telah dilakukan Penghapusan pada Semester I Tahun 2017 sesuai SK Penghapusan Barang Milik Negara dari Sekretaris Utama Nomor : KEP-113/K.SU/05/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Nomor : 339/2016 Tanggal 17 Oktober 2017

**1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017.

**j. Aset Lainnya**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki Aset lainnya.

**1) Aset Tak Berwujud**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki Aset Tak Berwujud.

**k. BMN Berupa Aset Bersejarah**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

2 **BMN pada Perwakilan BPKP Aceh Per 30 Juni 2017**

a. **BMN Per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 57.317.550.609. (diisi gabungan ekstrakomptabel & intrakomptabel). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	Aset Lancar			
1	Persediaan	Rp. 71.469.402	Rp. -	Rp. 71.469.402
<b>Sub Jumlah A</b>		<b>Rp. 71.469.402</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. 71.469.402</b>
B	Aset Tetap			
1	Tanah	Rp. 37.003.522.000	Rp. -	Rp. 37.003.522.000
2	Peralatan & Mesin	Rp. 4.992.103.114	Rp. 3.298.750	Rp. 4.995.401.864
3	Gedung & Bangunan	Rp. 14.840.771.000	Rp. -	Rp. 14.840.771.000
4	Jalan dan Jembatan	Rp. 23.718.000	Rp. -	Rp. 23.718.000
5	Jaringan	Rp. 432.497.000	Rp. -	Rp. 432.497.000
6	Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.640.745	Rp. -	Rp. 21.640.745
7	KDP	Rp. -	Rp. -	Rp. -
<b>Sub Jumlah B</b>		<b>Rp. 57.314.251.859</b>	<b>Rp. 3.298.750</b>	<b>Rp. 57.317.550.609</b>
C	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2	Aset Tak Berwujud	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
<b>Sub Jumlah C</b>		<b>Rp. -</b>	<b>Rp. -</b>	<b>Rp. -</b>
<b>Total</b>		<b>Rp. 57.385.721.261</b>	<b>Rp. 3.298.750</b>	<b>Rp. 57.389.020.011</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 per Perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A	<b>Aset Tetap</b>			
1	Peralatan & Mesin	Rp 4.378.808.421	Rp 3.298.750	Rp 4.382.107.171
2	Gedung & Bangunan	Rp 244.860.628	Rp -	Rp 244.860.628
3	Jalan dan Jembatan	Rp 3.953.000	Rp -	Rp 3.953.000
4	Jaringan	Rp 70.826.497	Rp -	Rp 70.826.497
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Sub Jumlah A</b>		<b>Rp 4.698.448.546</b>	<b>Rp 3.298.750</b>	<b>Rp 4.701.747.296</b>
B	<b>Aset Lainnya</b>			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Sub Jumlah B</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 4.698.448.546</b>	<b>Rp 3.298.750</b>	<b>Rp 4.701.747.296</b>

**b. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 per akun Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	Rp. 71.469.402	Rp. 71.469.402	Rp. -
2	Tanah	Rp. 37.003.522.000	Rp. 37.003.522.000	Rp. -
3	Peralatan & Mesin	Rp. 4.992.103.144	Rp. 4.992.103.144	Rp. -
4	Gedung & Bangunan	Rp. 14.840.771.000	Rp. 14.840.771.000	Rp. -
5	Jalan dan Jembatan	Rp. 23.718.000	Rp. 23.718.000	Rp. -
6	Jaringan	Rp. 432.497.000	Rp. 432.497.000	Rp. -
7	Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.640.745	Rp. 21.640.745	Rp. -
8	KDP	Rp. -	Rp. -	Rp. -
9	Aset Tak Berwujud	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10	Aset Lain-lain *)	Rp. -	Rp. -	Rp. -
<b>Total</b>		<b>Rp 57.385.721.291</b>	<b>Rp. 57.385.721.291</b>	<b>Rp.</b>

\*) Aset Lain-lain pada Laporan Barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari perasional pemerintah

## E. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut.

No.	Periode Lap.	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2013	Rp. 67.560.631.006	Rp. 968.313.902	145,41%
2	2014	Rp.67.770.976.504	Rp.	
3	2015	Rp.69.102.665.519	Rp.	
4	2016	Rp.67.102.665.519	Rp.	
5	2017	Rp.57.317.550.609	Rp.	

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Perwakilan BPKP Aceh Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan
1	Tanah	Rp. 37.003.522.000	Rp. -
2	Peralatan & Mesin	Rp. 4.951.297.114	Rp. 40.806.000
3	Gedung & Bangunan	Rp. 14.462.747.000	Rp. 378.024.000
	Jalan	Rp. -	Rp. 23.718.000
4	Jaringan	Rp. 425.000.000	Rp. -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.640.745	Rp. -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 56.864.206.859</b>	<b>Rp. 442.548.000</b>

#### b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Peng-Gunaan	Peman-Faatan	Pemindah-tanganan	Peng-Hapusan
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	- unit	- unit	- unit	- unit
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
3	Dalam proses Pengelola Barang	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
4	Selesai di Pengelola Barang a. Dikembalikan b. Ditolak c. Disetujui	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
7	Tindak lanjut oleh Pengguna Barang	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit
8	Selesai serah terima	-. Unit	-. Unit	-. Unit	-. Unit

**c. Pengelolaan BMN Idle**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle	-. Unit
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	-. Unit
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh Pengelola	-. Unit
4	Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-. Unit
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-. Unit

**3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.

**5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

**6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

**a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

**b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak memiliki BMN kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

**7. BMN berupa BPYBDS**

Perwakilan BPKP Aceh per 31 Desember 2017 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.



## **8. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain sebagai berikut.

- a. Alat kantor dan Rumah Tangga khususnya (meja dan kursi) sering berpindah tempat tanpa sepengetahuan pengelola BMN
- b. Masalah Label sering terlepas dari barangnya

## **9. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga seperti diuraikan pada poin 8 di atas, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : meningkatkan kualitas pengendalian fisik atas asset dengan mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan.